

EFEKTIVITAS DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

Nana Nur Hikma H¹, Farhanuddin Jamanie² dan Fajar Apriani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan meliputi : a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, c. Perencanaan yang matang, d. Tersedianya sarana dan prasarana, e. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik beserta faktor penghambatnya. Sumber data primer meliputi Kasi. Pelayanan Rehabilitas Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia selaku *Key Informan*, dan anak jalanan yang telah dibina dan beraktivitas di jalanan, LSM seperti panti-panti atau yayasan dan pemerhati anak yang berperan sebagai pengawas kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial untuk anak jalanan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) sebagai pihak yang netral terhadap penanganan anak jalanan selaku *Informan*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) dengan teknik : observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Alat analisis data yang digunakan yaitu data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial belum efektif dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda meliputi kurangnya dana operasional, orangtua anak jalanan yang kurang peduli terhadap masa depan anak dan faktor perilaku masyarakat yang masih saja melakukan pemberian uang atau bertransaksi kepada anak jalanan di jalanan yang semata-mata dilandasi rasa belas kasihan semata atau sikap masyarakat yang cenderung acuh terhadap pelanggaran perda yang telah ditetapkan, minimnya sosialisasi khususnya sosialisasi kepada orangtua anak jalanan dan masyarakat serta sumberdaya manusia yang kurang di dalam pemberian penanganan berupa pembinaan kepada anak jalanan.

Kata Kunci : Efektivitas, Anak Jalanan.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya anak juga memang harus diberikan perlindungan dan haknya. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan”. Seperti halnya yang dijabarkan pada UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak-anak jalanan pada umumnya memiliki beberapa kesibukan pekerjaan ataupun aktivitas diantaranya ialah seperti mengamen, meminta-minta, jual jasa kebersihan seperti membersihkan mobil dan menyemir sepatu, anak jalanan yang menjajakan suatu barang seperti rokok, makanan, minuman, koran dan anak jalanan yang hanya meminta belas kasihan yang biasa disebut dengan pengemis hingga anak jalanan yang mengedarkan *list* atau daftar sumbangan. Dalam hal ini anak jalanan yang berusia 5-9 tahun biasanya anak-anak yang memiliki tempat tinggal tepat (masih memiliki orangtua ataupun keluarga) sehingga mereka berada di jalanan kurang dari tujuh jam dalam sehari. Kemudian anak jalanan yang berumur 10-14 tahun sebagian ialah yang masih sekolah dan masih memiliki tempat tinggal tetap walaupun tidak bersama orangtuanya.

Seperti halnya anak jalanan di Samarinda mereka memiliki beberapa masalah yang membuat mereka terjun dan bergabung menjadi anak jalanan, salah satunya adalah masalah ekonomi dimana dalam hal ini mengharuskan mereka menjadi sumber penopang ekonomi (pekerja anak) di jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan masih terdapat banyaknya masalah yang harus segera ditangani oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Berdasarkan buku Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial (2015 : 4), adapun masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran orangtua terhadap bahaya aktivitas anak di jalanan.
2. Terkadang orangtua justru meminta anaknya agar dapat membantu secara ekonomi dan pada gilirannya anak harus berada di jalanan untuk mencari nafkah.
3. Anak dalam kondisi keluarga tidak mampu sehingga harus membantu perekonomian keluarga.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membari atau melakukan pembelian atau transaksi di jalanan.

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Organisasi

Pada dasarnya, alasan dari didirikannya suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab, maka pencapaian tujuan dari organisasi tersebut di harapkan dapat terlaksana dengan hasil yang baik. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Robbins dan Judge (dalam Wibowo, 2014 : 1) Organisasi adalah unit sosial yang secara sadar dikoordinasikan, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Menurut Allen (dalam Hasibuan, 2003 : 11) bahwa organisasi diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggungjawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Berdasarkan definisi organisasi dari beberapa pandangan ahli organisasi tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa organisasi merupakan tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul dan bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen Sumberdaya Manusia

Hasibuan (2014 : 11) menjelaskan bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Selanjutnya definisi manajemen sumberdaya manusia yang dikemukakan oleh Samsudin (dalam Wukir, 2001 : 24) menjelaskan bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, cara-cara mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan.

Perilaku Organisasi

Menurut Wibowo (2014 : 2) Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dan individu, kelompok dan struktur dalam organisasi, dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektifitas organisasi. Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2014 : 2) mengatakan perilaku organisasi ialah merupakan bidang yang mencari peningkatan pengetahuan dari semua aspek perilaku dalam pengaturan organisasional melalui penggunaan metode saintifik.

Efektivitas Organisasi

Mahmudi (2005 : 92) menjelaskan bahwa efektivitas adalah terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *Spending Wisely*.

Selanjutnya definisi efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian (2001 : 24) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa yang telah dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasannya.

Winardi (2009 : 84) menjelaskan efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu, dan efektivitas keorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dan lingkungannya. Berbicara mengenai efektivitas organisasi bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ada dua aspek yang meliputinya, yaitu:

1. Tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Melihat dari uraian mengenai efektivitas dan efektivitas organisasi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi lebih dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber daya yang ada.

Penanganan Anak Jalanan

Pada dasarnya anak jalanan merupakan anak yang kehidupan kesehariannya berada di jalanan atau anak yang dalam aktivitasnya di jalanan. Seperti yang dikemukakan dalam Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun

2012 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda, anak jalanan merupakan orang-orang atau anak manusia dengan batasan usia 18 tahun ke bawah yang melakukan aktivitasnya di samping-samping jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya Nugroho (2000 : 78) menyatakan bahwa penggunaan istilah anak jalanan berimplikasi pada dua pengertian yang harus dipahami. Pertama, pengertian sosiologi, yaitu menunjuk pada aktivitas sekelompok anak yang keluyuran di jalan-jalan. Masyarakat mengatakan sebagai kenakalan anak, dan perilaku mereka dianggap mengganggu ketertiban sosial. Kedua, pengertian ekonomi, yaitu menunjukkan pada aktivitas sekelompok anak (pekerja anak) yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena kondisi ekonomi orangtua yang miskin. Berdasarkan para pakar tersebut di atas maka penulis dapat memahami bahwa anak jalanan adalah orang-orang atau anak manusia dengan batasan usia 18 tahun ke bawah yang tersisih ataupun marginal yang melakukan berbagai aktivitasnya dengan menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Definisi Konseptual

Efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan adalah suatu rangkaian kegiatan atau sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dan lingkungannya yang merujuk pada tingkat jauh kesiapan organisasi dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan dengan melalui proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, adapun perencanaan yang matang, tersedianya sarana dan prasarana, serta pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan kebijakan penanganan anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan untuk hidup mandiri maupun bekerja untuk dirinya sendiri dan atau untuk orangtuanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2002 : 3) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Peneliti menetapkan fokus dimana Spradley (dalam Sugiyono, 2015 : 208) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan fokus sebagai berikut:

1. Efektivitas penanganan terhadap anak jalanan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial:
 - a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
 - b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
 - c. Perencanaan yang matang.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana.
 - e. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.
2. Faktor penghambat efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yakni:

- a. Key informan adalah Kasi. Pelayanan Rehabilitas Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia.
- b. Informan adalah anak jalanan yang telah dibina dan beraktivitas di jalanan, LSM seperti panti-panti atau yayasan dan pemerhati anak yang berperan sebagai pengawas kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial untuk anak jalanan dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) sebagai pihak yang netral terhadap penanganan anak jalanan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain, seperti: Dokumen dokumen, arsip-arsip, laporan dan lain sebagainya yang ada di Dinas Kesejahteraan Sosial serta Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan, dan juga internet.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dari Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33), yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifying*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda terletak di Jalan Dahlia No.12 Samarinda. Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perda yang berlaku diantaranya: Tugas Pokok Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dan Fungsi dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008. Visi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Secara Bersama-Sama Antara Pemerintah dan Masyarakat” dan nilai-nilai inti yang terkandung adalah:

1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
2. Usaha pemerintah dan masyarakat.
3. Menuju keadilan sosial.

Selanjutnya misi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah:

1. Mengentaskan/mengurangi kemiskinan dan mencegah tumbuh dan berkembangnya serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
4. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Memelihara dan meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial.
6. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Sumber Daya Manusia di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda terdapat berjumlah 73 pegawai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penanganan terhadap Anak Jalanan

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Gibson (dalam Tangkilisan 2005 : 141) mengatakan bahwa efektivitas organisasi diukur dari: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Adapun pembahasan yang peneliti dapat paparkan adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan langkah awal dalam mengukur efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam penanganan anak jalanan. Semakin tinggi kejelasan dari tujuan yang hendak dicapai maka semakin tinggi pula komitmen organisasi tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda tidak bekerja sendiri dalam mencapai tujuannya, tetapi melibatkan beberapa instansi yang terkait.

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data diketahui kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan tujuan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda terhadap anak jalanan kurang efektif hal ini dikarenakan adanya hambatan mengenai waktu, dana dalam melakukan berbagai kegiatan yang menunjang ketercapaiannya tujuan yang telah ditentukan tersebut serta minimnya sarana untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi seperti spanduk, alat pengeras, dan lain-lain. Selain itu juga minimnya kegiatan yang dilakukan khususnya sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai larangan memberikan uang atau transaksi di jalan karena perilaku masyarakat juga berpengaruh besar terhadap kemunculan anak jalanan.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam melaksanakan strategi penanganan

terhadap anak jalanan belum dapat dikatakan maksimal hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan dalam suatu strategi pencapaian tujuan terhambat oleh kurangnya Manajemen Sumber Daya Manusia di dalam pembinaan yang diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial bersama Panti Sehati Terpadu dan juga minimnya dana yang tersedia. Sehingga kejelasan strategi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam memberikan penanganan kepada anak jalanan diharapkan bisa lebih maksimal di dalam melaksanakan rangkaian dari setiap strategi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dipahami bahwa strategi ialah penetapan berbagai tujuan dengan penetapan rencana aktivitas guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

3. Perencanaan yang Matang

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, perencanaan (*planning*) merupakan proses dasar dari suatu organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Berdasarkan dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa perencanaan yang disusun oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda belum dapat dikatakan matang dikarenakan upaya dalam melakukan kegiatan perencanaan terhambat oleh minimnya dana yang ada dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun.

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Di dalam menunjang suatu tujuan yang hendak dicapai sarana dan prasarana menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi. Pencapaian tujuan sulit berjalan jika tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan dari hasil pengumpulan data mengenai sarana dan prasarana di dalam menunjang penanganan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda diketahui bahwa upaya dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk anak jalanan terhambat oleh minimnya dana anggaran sehingga fasilitas yang disediakan kurang mendukung.

5. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik diketahui belum efektif dikarenakan masih terdapat kendala berupa kurangnya dana operasional dengan berbagainya kegiatan. Memang dana sangatlah diperlukan sebab dari sejumlah dana yang ada tidak mampu untuk menutupi kebutuhan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas serta kegiatan-kegiatan untuk penanganan anak jalanan, sehingga akibatnya penanganan anak jalanan

terhambat. Selain itu kesadaran orang tua yang minim terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak juga turut menjadi hambatan.

6. Faktor Penghambat Efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Samarinda.

1. Faktor dana atau biaya operasional kurang.
2. Faktor orangtua anak jalanan yang kurang peduli terhadap pentingnya masa depan untuk anak.
3. Faktor perilaku masyarakat yang dilandasi rasa belas kasihan semata terhadap anak jalanan sehingga tidak mengatasi aktivitas anak jalanan di jalanan sehari-hari.
4. Faktor minimnya sosialisasi khususnya sosialisasi kepada orangtua anak jalanan dan masyarakat.
5. Faktor sumberdaya manusia yang kurang di dalam pemberian penanganan berupa pembinaan kepada anak jalanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda cukup efektif dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda sebab telah memiliki tujuan strategi yang cukup jelas, namun pada perencanaan yang disusun belum matang, sarana dan prasarana kurang memadai dan sistem pengawasan serta pengendalian juga belum efektif.

Secara khusus, efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda terjabar sebagai berikut :

- a. Tujuan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda terhadap penanganan anak jalanan cukup jelas, tetapi di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam mewujudkan tujuan tersebut adanya hambatan dikarenakan waktu yang kurang memadai, minimnya dana serta minimnya sarana dan kegiatan yang dilakukan khususnya sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Strategi pencapaian tujuan yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda terhadap penanganan anak jalanan belum dapat dikatakan maksimal hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan dalam suatu strategi pencapaian tujuan terhambat oleh kurangnya Manajemen Sumber Daya Manusia di dalam pembinaan yang diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial bersama Panti Sehati Terpadu dan juga minimnya dana yang tersedia.
- c. Perencanaan yang disusun oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda belum dapat dikatakan matang dikarenakan upaya dalam

- melakukan kegiatan perencanaan terhambat oleh adanya minimnya dana.
- d. Sarana dan prasarana Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda bersama panti Sehati terhadap penanganan anak jalanan kurang memadai, hal ini dikarenakan fasilitas yang tersedia untuk anak jalanan terhambat oleh adanya dana anggaran yang minim.
 - e. Sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda diketahui belum efektif dikarenakan masih terdapat kendala berupa kurangnya dana operasional. Selain itu kesadaran orang tua yang minim terhadap masa depan anak juga turut menjadi hambatan.
2. Faktor penghambat efektivitas Dinas Kesejahteraan Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda adalah kurangnya dana operasional untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial untuk anak jalanan, kurangnya kepedulian orangtua anak jalanan mengenai terhadap masa depan anak agar lebih baik, kurangnya peran orangtua kepada anak jalanan di dalam memberikan perhatian mengenai bahaya atau resiko jika anak melakukan aktivitas di jalanan dan perilaku masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap pelanggaran Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda atau perilaku masyarakat yang masih saja melakukan pemberian uang atau bertransaksi di jalanan yang semata-mata karena dilandasi rasa simpatik atau belas kasihan dan juga minimnya sosialisasi khususnya sosialisasi kepada orangtua anak jalanan dan masyarakat serta sumberdaya manusia yang kurang di dalam pemberian penanganan berupa penanganan kepada anak jalanan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Dinas Kesejahteraan Sosial kota samarinda diantaranya sebagai berikut:

1. Hal yang dilakukan masyarakat didalam bentuk pemberian uang atau bertransaksi di jalanan dengan anak jalanan di harapkannya ada penerapan sanksi secara tegas oleh pemerintah terkait hal tersebut didalam penerapan pelanggaran atas perda Nomor 16 Tahun 2002
2. Adanya dana operasional Dinas Kesejahteraan Sosial yang minim diharapkan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk bisa mengkaji kembali dana operasional bagi Dinas Kesejahteraan Sosial yang digunakan sebagai penunjang ketercapaian tujuan
3. Minimnya sosialisasi yang di lakukan meningkatkan maka diharapkan bagi Dinas Kesejahteraan Sosial untuk lebih meningkatkan sosialisasi khususnya sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua anak jalanan, hal ini tentu akan lebih menyadarkan masyarakat terutama kepada orangtua mengenai bahaya

anak berada di jalanan dan agar orangtua sadar agar tidak mempekerjakan anaknya di jalanan dan lebih memikirkan keselamatan bagi anak serta mengenai hal-hal lainnya sehingga hal tersebut bisa membuat Dinas Kesejahteraan Sosial merasa terbantu dalam melaksanakan tugas dan tujuan mereka.

4. Kurangnya Manajemen Sumberdaya Manusia didalam pemberian pembinaan kepada anak jalanan diharapkan bagi panti Sehati agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan cara memberikan pelatihan pengembangan SDM agar di dalam pemberian penanganan berupa pembinaan kepada anak jalanan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- _____. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Pembaruan.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPPAMP YKPN.
- Nugroho, Heru. 2000. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- _____. 2009. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosidah, Ambar T. Sulistiyani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : GRAHA ILMU.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Soeparman, Herman. 2000. *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Dokumen :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal Ayat 20-21

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. 2015. Penanganan Anak Jalanan.

Skripsi :

Etriana, Ria. 2013. *Upaya Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Teknik Komunikasi Persuasi di Kota Samarinda*. Samarinda : Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Perdana, Richi Wahyu. 2011. *Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kota Samarinda*. Samarinda : Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Safitri, Firda Ramadania. 2012. *Studi tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda*. Samarinda : Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Triastika, Maria Cindy. 2013. *Efektivitas Program Bimbingan Mental Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Anak Putus Sekolah di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat*. Kutai Barat : Program Studi Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Website :

<http://digilib.unila.ac.id/pdf>. Efektivitas Organisasi. Diakses 20 Desember 2016

<http://www.landasanteori.com>. Penyebab Munculnya Anak Jalanan. Diakses 17 November 2016.

<https://www.scribd.com/doc>. Perilaku Agresi pada Anak Jalanan di Lampu Merah. Diakses 20 Desember 2016.

<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>. 2 Kategori Anak Jalanan. Diakses 20 Desember 2016.

<http://karyatulisilmiah.com/efektivitas-organisasi/>. Diakses 5 Januari 2017.

<http://ilmukeolahragaan.blogspot.co.id>. [efektivitas-dalam-organisasi.html](#). Diakses 5 Januari 2017.

<http://eprints.uny.ac.id>. Anak Jalanan. [Diakses 6 Januari 2017](#).

<http://pengertian-menurut.blogspot.co.id>. Kriteria Anak Jalanan. [Diakses 6 Januari 2017](#)

<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>. Diakses 9 Januari 2017.